

ABSTRAK

Kepala Desa menyimpan kutipan Letter C untuk dapat digunakan sebagai dasar mengetahui pemilik tanah yang sudah tercatat sejak jaman Kolonial Belanda dan kemudian dapat digunakan sebagai dasar pembuatan sertifikat. Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan yang dimaksud adalah karena dalam hukum agraria nasional masih menganggap eksistensi hukum adat sebagai dasar pelaksanaan peralihan tanah. Jika Kepala Desa tidak dapat melakukan pencatatan dengan baik, maka kepastian dan perlindungan hukum tidak akan terlindungi.

Penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer (*primary sources*), bahan hukum sekunder (*secondary sources*), serta bahan hukum tersier (*tertiary sources*). Bahan hukum dikumpulkan dengan *library research* (studi pustaka) dan dianalisis dengan metode preskriptif.

Kepala Desa dalam rezim UUPA tetap diberikan tanggungjawab untuk melakukan urusan pertanahan di desa. Hal ini termasuk dalam UU Desa Kepala Desa ditugaskan untuk melakukan semua tindakan yang berkaitan dengan masyarakat Desa, termasuk urusan pertanahan meski tidak diatur secara eksplisit. Satu sisi tugas tersebut baik untuk memberikan kepastian hukum, namun tidak semua Kepala Desa mempunyai kemampuan yang komprehensif terkait pertanahan. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang dicatatkan dalam Letter C dalam hal terjadi sengketa adalah dapat melakukan tindakan-tindakan non litigasi seperti mediasi, negosiasi, konsolidasi, dengan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah. Pemegang hak juga dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah dengan bukti letter C untuk dikonvensi menjadi sertifikat hak milik. Sebagai saran maka Pemerintah hendaknya membekali Kepala Desa dengan pengetahuan pertanahan supaya tanah-tanah Letter C dapat dikonvensi menjadi hak milik. Selain itu, Pemerintah seharusnya terus melakukan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat secara lebih massif dan luas kepada semua masyarakat, terutama terhadap subjek hukum yang memiliki dasar Letter C.

Kata Kunci: Buku Desa, Kepala Desa, Letter C.

ABSTRACT

The Head of Village keeps the C Letter quotation to be used as a basis to find out the owner of the land that has been recorded since the Dutch Colonial era and can then be used as a basis for making a certificate. The village government will be the executor who has a very important role. The role in question is because in national agrarian law still considers the existence of customary law as the basis for the implementation of land acquisition. If the village head is unable to properly record, then legal certainty and protection will not be protected.

This research is juridical-normative. The approach used is the statute approach and conceptual approach. Data sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal materials were collected by library research and analyzed by prescriptive methods.

The Head of Village in the UUPA regime is still given responsibility for conducting land affairs in the village. This is included in the Village Law. The Village Head is tasked with carrying out all actions related to the Village community, including land affairs even though it is not explicitly regulated. One side of the task is good for providing legal certainty, but not all village heads have comprehensive capabilities related to land matters. Legal protection for holders of land rights recorded in Letter C in the event of a dispute is able to carry out non-litigation actions such as mediation, negotiation, consolidation, with the disputing parties to resolve the problem. Rights holders can also register land rights with proof of letter C to be converted into a certificate of ownership. As a suggestion, the Government should equip the Village Head with land knowledge so that Letter C lands can be converted into ownership rights. In addition, the Government should continue to give land certificates to the community more massively and broadly to all communities, especially to legal subjects that have the basis of Letter C.

Keywords: *Village Book, Head Of Village, Letter C*